

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Konsep keberlanjutan kini menjadi fondasi utama dalam bisnis modern. Meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab ekonomi telah mendorong perusahaan untuk tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Menurut John Elkington (1994), konsep *Triple Bottom Line* menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi (*profit*), tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Konsep tersebut menjadi dasar berkembangnya praktik bisnis berkelanjutan yang saat ini semakin mendapat perhatian dari investor, regulator, dan para pemangku kepentingan lainnya (Pallavi & Pandey, 2025).

Bagi sektor manufaktur di Asia Tenggara, implementasi prinsip keberlanjutan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi kawasan, tuntutan rantai pasok global, serta berkembangnya standar pelaporan keberlanjutan. ASEAN dipilih sebagai konteks penelitian karena merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang pesat dan memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian regional. Selain itu, kawasan ini terus mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan seperti *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance*, yang bertujuan menciptakan

harmonisasi praktik keuangan berkelanjutan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini difokuskan pada lima negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Pemilihan kelima negara ASEAN didasarkan pada karakteristik sektor manufaktur yang beragam, mulai dari industri berbasis sumber daya alam, manufaktur berorientasi ekspor, hingga industri berteknologi tinggi (UNCTAD, 2025). Kelima negara tersebut juga telah mengimplementasikan kerangka *ASEAN Taxonomy* sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan keuangan berkelanjutan dan taksonomi nasional, meskipun tingkat adopsi, regulasi, dan implementasinya berbeda pada masing-masing negara. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi, regulasi keberlanjutan, kualitas tata kelola perusahaan, serta implementasi praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di kelima negara tersebut menciptakan variasi dalam penerapan praktik keberlanjutan..

Selain itu, sektor manufaktur di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina merupakan salah satu kontributor utama terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Besarnya kontribusi sektor manufaktur menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan, efektivitas pengendalian lingkungan, dan kredibilitas pengungkapan keberlanjutan pada sektor ini tidak hanya memengaruhi kinerja perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap daya saing industri dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan ASEAN. Berikut profil ekonomi dan karakteristik sektor manufaktur lima negara ASEAN tahun 2024 (ASEAN Secretariat, 2025; UNCTAD, 2025):

**Tabel 1. 1 Profil Ekonomi dan Karakteristik Sektor Manufaktur Negara**

**ASEAN-5 Tahun 2024**

| Negara    | GDP Nominal (US\$ miliar) | MVA – Nilai Tambah Manufaktur (US\$ miliar) | Kontribusi Manufaktur terhadap GDP (%) | FDI Inflow 2024 (US\$ miliar) | Sektor Manufaktur Utama                                                                |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Singapura | 501.4                     | 85.80                                       | 17.12%                                 | 143.4                         | Biofarmasi, semikonduktor canggih, presisi engineering, elektronik bernilai tinggi     |
| Malaysia  | 399.7                     | 92.00                                       | 23.02%                                 | 11.4                          | Semikonduktor (assembly, testing & packaging), elektronik & E&E, produk listrik, kimia |
| Indonesia | 1,371.2                   | 255.96                                      | 18.66%                                 | 24.2                          | Hilirisasi logam & nikel, otomotif & EV supply chain, makanan & minuman, kimia dasar   |
| Thailand  | 514.5                     | 128.87                                      | 25.04%                                 | 11.0                          | Otomotif & EV hub, elektronik, petrokimia, mesin & peralatan industri                  |
| Filipina  | 437.1                     | 70.94                                       | 16.23%                                 | 8.9                           | Komponen elektronik, semikonduktor, pengolahan makanan, peralatan listrik ringan       |

Sumber : Di olah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.1, sektor manufaktur memiliki peran strategis di setiap negara ASEAN-5. Singapura menjadi penerima FDI tertinggi (US\$143,4 miliar) karena didukung industri manufaktur berteknologi tinggi. Indonesia mencatat nilai tambah manufaktur terbesar (US\$255,96 miliar), sedangkan Thailand (25,04%) dan Malaysia (23,02%) memiliki kontribusi manufaktur terhadap PDB tertinggi. Sementara itu, Filipina tetap menunjukkan peran sektor manufaktur meskipun kontribusinya relatif lebih rendah dibandingkan negara ASEAN-5 lainnya. Secara lebih spesifik, dominasi manufaktur di kawasan ini terkonsentrasi pada dua klasifikasi sektor utama, yaitu *Basic Materials* (Industri Dasar) dan *Industrials*

(Industri). Kedua sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap emisi karbon dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif agar pelaksanaan transisi hijau dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (ASEAN Secretariat, 2025; UNCTAD, 2025).

Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan, perusahaan manufaktur mendapatkan tekanan lebih besar dari berbagai pihak seperti investor, regulator, pasar dan masyarakat untuk menunjukkan kinerja lingkungan yang lebih baik. Dalam praktiknya, tidak seluruh perusahaan mampu mengimplementasikan komitmen tersebut secara nyata. Sebagian perusahaan justru melakukan praktik *greenwashing*, yaitu tindakan menyampaikan informasi lingkungan yang berlebihan, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan kondisi operasional yang sebenarnya. Praktik tersebut menyebabkan informasi keberlanjutan kehilangan kredibilitas sehingga dapat menyesatkan investor dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Nishitani et al., 2021). Sholikin et al., (2024) menyebutkan bahwa praktik *greenwashing* merupakan manipulasi citra keberlanjutan melalui pelaporan yang menyesatkan tanpa adanya perbaikan nyata terhadap kinerja lingkungan, sehingga keberlanjutan sering kali bersifat simbolik, bukan substantif.

Bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan terkait praktik *greenwashing* menjadi tantangan utama pada perusahaan manufaktur di kawasan ASEAN-5. Di Indonesia, PT Astra Agro Lestari Tbk menjadi sorotan lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil terkait dugaan adanya kesenjangan antara komitmen keberlanjutan dengan praktik di lapangan, khususnya berhubungan dengan tata

kelola, konflik lahan, dan pengelolaan lingkungan pada sektor kelapa sawit. (WALHI, 2024, 2025). Di Thailand, implementasi proyek energi terbarukan dalam kebijakan *Bio-Circular-Green (BCG) Economy* juga mendapat perhatian karena dinilai lebih menonjolkan narasi keberlanjutan dibandingkan bukti nyata mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan (Reccessary, 2024.). Di Filipina, *Philip Morris Fortune Tobacco Corporation (PMFTC)* ebagai perusahaan manufaktur produk tembakau mendapat sorotan karena berbagai inisiatif lingkungannya dinilai berpotensi membangun citra ramah lingkungan, meskipun aktivitas utama perusahaan tetap menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan (Tobaccoreporter, 2025.). Di Malaysia, berbagai perusahaan menggunakan klaim ramah lingkungan tanpa didukung bukti atau sertifikasi yang memadai. Sementara di Singapura, penelitian *Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS)* juga menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan, termasuk di sektor manufaktur, masih menggunakan klaim lingkungan yang bersifat umum, ambigu, dan sulit diverifikasi (CCCS, 2023), (Bernama, n.d.).

Fenomena *greenwashing* yang terjadi di berbagai negara ASEAN menunjukkan bahwa komitmen keberlanjutan perusahaan belum selalu diikuti oleh implementasi kinerja lingkungan yang sesungguhnya. Dari perspektif *agency theory*, praktik *greenwashing* terjadi akibat adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Manajemen mengetahui kondisi perusahaan secara lebih mendalam dibandingkan pemegang saham sehingga memiliki peluang untuk menyampaikan informasi lingkungan secara selektif demi menjaga reputasi perusahaan atau memperoleh keuntungan ekonomi tertentu. Ketika mekanisme pengawasan perusahaan tidak berjalan secara

efektif, peluang terjadinya manipulasi informasi keberlanjutan akan semakin besar (Bu et al., 2024; Hennig et al., 2023).

Sementara itu, dari perspektif *stakeholder theory*, meningkatnya tekanan dari investor, pemerintah, dan masyarakat mendorong perusahaan manufaktur untuk menunjukkan komitmen lingkungan yang tinggi. Namun demikian, apabila perusahaan belum memiliki kemampuan operasional yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut, perusahaan cenderung menggunakan strategi komunikasi simbolik melalui pengungkapan keberlanjutan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Akibatnya, laporan keberlanjutan lebih berfungsi sebagai alat membangun citra dibandingkan sebagai media pertanggungjawaban perusahaan (Lee et al., 2025; Mishra et al., 2025; Singhania et al., 2025).

Dalam upaya memitigasi praktik *greenwashing* tersebut, peran mekanisme *corporate governance* menjadi sangat krusial sebagai mekanisme pengawasan internal utama. Mekanisme *corporate governance* merupakan sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, komite audit, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa perusahaan menerapkan tata kelola yang mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dalam pengambilan keputusan, serta adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Dewan komisaris yang independen, komite audit yang efektif, keberagaman dewan, serta keberadaan komite keberlanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan dan mengurangi peluang terjadinya praktik *greenwashing* (Naciti et al., 2022; Wahyuningrum et al., 2025).

Namun, efektivitas kebijakan strategis di tingkat dewan tidak akan berdampak nyata tanpa adanya penguat operasional. Secara langsung, *Environmental Management Control Systems* (EMCS) berperan sebagai sistem pengendalian manajemen yang mengintegrasikan perencanaan lingkungan, pengukuran kinerja, pemantauan, pelaporan, serta evaluasi pencapaian tujuan lingkungan perusahaan (Johnstone, 2022). Selain berperan sebagai mekanisme pengendalian yang secara langsung dapat mengurangi praktik *greenwashing*, EMCS dalam penelitian ini juga diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara mekanisme *corporate governance* dan praktik *greenwashing*. Peran moderasi tersebut didasarkan pada pandangan bahwa mekanisme *corporate governance* menyediakan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis, tetapi efektivitasnya dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajemen bergantung pada keberadaan sistem pengendalian yang mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik operasional. EMCS memperkuat efektivitas mekanisme *corporate governance* dalam menekan praktik *greenwashing* melalui sistem verifikasi internal pada setiap klaim lingkungan. Sistem ini memastikan kebijakan strategis dewan tersinkronisasi dengan aktivitas operasional, sehingga meminimalkan peluang tindakan oportunistik manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan dan keberlanjutan. (Abbas, 2025; Hennig et al., 2023).

Berbagai fenomena empiris dan perkembangan regulasi yang ada, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada perusahaan manufaktur di kawasan ASEAN. Pertama, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kualitas *environmental disclosure* atau pengungkapan

keberlanjutan, bukan secara langsung pada praktik *greenwashing* sebagai bentuk perilaku oportunistik perusahaan. Padahal pengungkapan lingkungan tidak selalu mencerminkan kondisi lingkungan perusahaan secara aktual, karena perusahaan tetap dapat melakukan manipulasi citra keberlanjutan melalui informasi yang bersifat simbolis. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik *greenwashing* masih relatif terbatas, terutama dalam konteks negara berkembang dan kawasan ASEAN.

Kedua, hasil empiris terkait efektivitas mekanisme *corporate governance* dalam memitigasi praktik *greenwashing* masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian seperti Munir dan Lee menunjukkan bahwa independensi dan keberagaman dewan mampu menekan praktik *greenwashing* (Lee et al., 2025; Munir et al., 2025), namun penelitian Wahyuningrum menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan bahkan negatif terhadap pengungkapan iklim (Wahyuningrum et al., 2025). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme *corporate governance* perusahaan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lingkungan masih belum konsisten. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu masih meneliti mekanisme *corporate governance* secara parsial, seperti independensi dewan, ukuran dewan, atau komite audit secara terpisah dan mekanisme *corporate governance* lainnya, sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan mekanisme *corporate governance* perusahaan sebagai suatu sistem pengawasan yang terintegrasi dan saling melengkapi.

Ketiga, penelitian-penelitian terdahulu cenderung hanya menguji pengaruh langsung *environmental management control systems* terhadap pengungkapan keberlanjutan. Masih relatif terbatas penelitian yang menguji mekanisme moderasi *environmental management control systems* dalam menjelaskan bagaimana

mekanisme *corporate governance* dapat menekan praktik *greenwashing*. Sejalan dengan *agency theory*, pengawasan perusahaan tidak hanya bergantung pada struktur mekanisme *corporate governance*, tetapi juga perlu didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif. Dengan adanya sistem tersebut, asimetri informasi dapat dikurangi sehingga peluang manajemen untuk bertindak oportunistik menjadi lebih kecil. Keempat, penelitian sebelumnya sebagian berasal diteliti di negara maju atau konteks Eropa dan Amerika Utara. Studi dalam konteks ASEAN masih terbatas, padahal karakteristik kawasan ini seperti kepemilikan terkonsentrasi, dominasi perusahaan keluarga, serta kualitas regulasi yang bervariasi dapat mempengaruhi efektivitas mekanisme *corporate governance* dan *environmental management control systems*.

Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan *Environmental Management Control Systems* (EMCS) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara mekanisme *Corporate Governance* dan praktik *greenwashing* pada perusahaan manufaktur di ASEAN. *Environmental management control systems* menjadi faktor penguat dalam mempengaruhi mekanisme *corporate governance* dalam memitigasi praktik *greenwashing*. Kedua, dari perspektif regulasi, studi ini mengaitkan mekanisme internal perusahaan dengan kepatuhan terhadap *ASEAN Taxonomy*, yang telah diadopsi oleh lima negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina).

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan implementasi *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance*, yang mendorong penerapan klasifikasi aktivitas ekonomi berkelanjutan secara lebih ketat di negara-negara ASEAN.

Kondisi tersebut meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan, namun di sisi lain juga berpotensi mendorong perusahaan melakukan praktik *greenwashing* apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan dan sistem pengendalian lingkungan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme *corporate governance* dan *Environmental Management Control Systems* (EMCS) berperan dalam memitigasi praktik *greenwashing* serta memastikan bahwa komitmen keberlanjutan perusahaan tercermin dalam implementasi operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap praktik *greenwashing*, menguji pengaruh *Environmental Management Control Systems* (EMCS) terhadap praktik *greenwashing*, serta menguji peran EMCS sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara mekanisme *corporate governance* dan praktik *greenwashing* pada perusahaan manufaktur di ASEAN.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap praktik *Greenwashing* pada perusahaan manufaktur di ASEAN?
2. Apakah *environmental management control systems* berpengaruh terhadap praktik *Greenwashing* pada perusahaan manufaktur di ASEAN?
3. Apakah *environmental management control systems* memoderasi pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap praktik *greenwashing* perusahaan manufaktur di ASEAN.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai:

1. Pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap praktik *greenwashing* pada perusahaan manufaktur di ASEAN.
2. Pengaruh *environmental management control systems* terhadap praktik *greenwashing* perusahaan manufaktur di ASEAN.
3. *Environmental management control systems* dalam memoderasi pengaruh mekanisme *corporate governance* dalam memitigasi praktik *greenwashing* perusahaan manufaktur di ASEAN.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:
  - a. Mengembangkan literatur mengenai praktik *greenwashing* dengan mengintegrasikan mekanisme *corporate governance* dalam menjelaskan upaya mitigasi praktik *greenwashing* pada perusahaan manufaktur di kawasan ASEAN.
  - b. Memperluas kajian mengenai peran *Environmental Management Control Systems* (EMCS), sebagai mekanisme pengendalian lingkungan yang berkontribusi dalam memitigasi praktik *greenwashing*, serta mengevaluasi perannya sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara mekanisme *corporate governance* dan praktik *greenwashing*.

- c. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* dan *Environmental Management Control Systems* (EMCS) terhadap praktik *greenwashing* pada perusahaan manufaktur di kawasan ASEAN, khususnya di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan rekomendasi bagi perusahaan manufaktur di ASEAN (Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina) dalam memperkuat mekanisme *corporate governance* dan *Environmental Management Control Systems* guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memitigasi praktik *greenwashing*.
- b. Mendukung implementasi *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* melalui penguatan mekanisme *corporate governance* dan *environmental management control systems* untuk mendorong praktik keberlanjutan lebih andal, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan yang didukung oleh praktik lingkungan yang nyata, sehingga mampu membangun kepercayaan investor, regulator, dan masyarakat serta mengurangi risiko reputasi akibat praktik *greenwashing*.
- d. Menjadi referensi bagi investor dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi mekanisme *corporate governance*, efektivitas *environmental management control systems*, serta kredibilitas pengungkapan keberlanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.